

Analisis Program Bela-Beli Kulon Progo Pada Perekonomian

¹Diasa Karimahakim, ²Uswatun Khasanah,

Email : ¹diasa1700010022@webmail.uad.ac.id, ²uswatun.khasanah@ep.uad.ac.id

Universitas Ahmad Dahlan

* *Corresponding Author*

Abstrak

Pembangunan ekonomi daerah atau lokal merupakan suatu proses keterlibatan pemerintah daerah dan elemen-elemen masyarakat secara bersama-sama melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya ataupun potensi-potensi lokal yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menggali pertumbuhan ekonomi dan ekonomi masyarakat serta pengentasan masyarakat dalam kemiskinan. Upaya mengatasi permasalahan tersebut salah satunya dengan Proram "Bela-Beli Kulon Progo". Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui implementasi program "Bela-Beli Kulon Progo" terhadap masyarakat di daerah Kulon Progo dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode bertujuan mendeskripsikan implementasi program "Bela-Beli Kulon Progo" terhadap masyarakat di daerah Kulon Progo. Hasil penelitian menggunakan dua perspektif yaitu perspektif masyarakat yang tergabung dalam Program "Bela-Beli Kulon Progo" dan perspektif dari *stakeholder* dalam Program "Bela-Beli Kulon Progo". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program "Bela-Beli Kulon Progo" dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas dan produktivitas, serta antusiasme dan keikutsertaan yang tinggi dalam program tersebut. Hasil lain melalui peran pemerintah daerah melalui dinas terkait diperoleh hasil sangat baik dan efisien melalui pemberian penyuluhan, pendampingan, pengawasan, dan selalu berinovasi dalam Program "Bela-Beli Kulon Progo" yang dirasakan langsung dan tidak langsung oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Abstract

Regional or local economic development is a process of involvement of local governments and elements of society in jointly managing local resources or potentials with the aim of creating new jobs that can stimulate economic and community growth as well as alleviating people in poverty. One of the efforts to overcome these problems is the "Bela-Beli Kulon Progo" program. This study has a purpose, namely to determine the implementation of the "Bela-Beli Kulon Progo" program for the people in the Kulon Progo area. This study uses a qualitative descriptive method by using survey research. The use of this method is in accordance with the purpose of this study, which is to describe the implementation of the "Bela-Beli Kulon Progo" program for the

Article history

Received 2021-10-03

Revised 2021-10-27

Accepted 2021-10-20

Keywords

Pembangunan Ekonomi

Daerah

Program "Bela-Beli Kulon Progo"

Perekonomian

Partisipasi Masyarakat

Stakeholder

JEL Classification*:

D12, D13, J22

community in the Kulon Progo area. The results of the study use two perspectives, namely the perspective of the community who are members of the "Bela-Beli Kulon Progo" Program and the perspective of stakeholders in the "Bela-Beli Kulon Progo" Program with the results obtained on the economy and community participation in the "Bela-Beli Kulon Progo" Program. directly and indirectly felt by the people of Kulon Progo Regency through employment, increasing income, increasing quality and productivity, as well as high enthusiasm and participation in the program. Other results through the role of local governments through related agencies obtained very good and efficient results through the provision of counseling, assistance, supervision, and always innovating in the "Bela-Beli Kulon Progo" Program which was felt directly and indirectly by the people of Kulon Progo Regency.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah atau lokal merupakan suatu proses keterlibatan pemerintah daerah dan elemen-elemen masyarakat secara bersama-sama melakukan pengelolaan terhadap sumber daya ataupun potensi-potensi lokal yang menciptakan suatu lapangan kerja baru sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tersebut. Sektor perekonomian merupakan salah satu indikator atau tolok ukur dalam keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara nasional ataupun daerah. Peran pemerintah baik pusat ataupun daerah sangat memiliki andil dalam proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat juga sebagai salah satu usaha mendorong perubahan yang bertujuan memberikan partisipasi ekonomi kerakyatan dalam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas masyarakat sehingga dapat mencapai segala sesuatu tentang kehidupan masyarakat baik pada segala bidang (Widjaja, 2003 dalam Habeahan, 2018).

Pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang melakukan kemitraan dengan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pemerintah daerah perlu mengemas upaya tersebut dengan cara melakukan inovasi dan terobosan. Kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan utama yaitu menggerakkan geliat ekonomi masyarakat serta pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Kabupaten Kulon Progo adalah wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel 1 bahwa tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Kulon Progo cukup tinggi walaupun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan.

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kulon Progo

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 23.31 | 21.39 | 20.64 | 21.40 | 20.30 | 20.03 | 18.30 | 17.39 |

Sumber: BPS Kabupaten Kulon Progo, (2020)

Upaya-upaya selalu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan. Salah satunya melalui program “Bela-Beli Kulon Progo” yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo pada kepemimpinan Bupati Hasto Wardoyo dan Wakil Bupati Sutedjo yang di ikrarkan pada tahun 2013. Program tersebut adalah gerakan dan ajakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk penanggulangan kemiskinan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Program tersebut menasar pada pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi-potensi lokal yang memiliki daya saing yang kuat. Pemetaan-pemetaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terhadap potensi lokal yang terdapat di Kabupaten Kulon Progo yang memiliki potensi unggulan dan daya saing yang kuat. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat memiliki geliat ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan perekonomian dan melepaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan.

Dari uraian di atas maka kontribusi utama dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi Program “Bela-Beli Kulon Progo” terhadap masyarakat. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua perspektif yaitu masyarakat yang tergabung dalam program tersebut serta stakeholder yang terlibat dalam program tersebut.

Tinjauan Pustaka

Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah atau lokal adalah keterlibatan antara pemerintah daerah dan elemen-elemen masyarakat dalam pengelolaan potensi-potensi lokal yang ada. Proses keterlibatan pemerintah daerah dan elemen-elemen masyarakat secara bersama-sama melakukan pengelolaan terhadap sumberdaya ataupun potensi-potensi lokal yang ada dengan melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan sekelompok

masyarakat. Kerjasama tersebut bertujuan menciptakan suatu lapangan kerja baru sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tersebut. Pembangunan ekonomi daerah atau regional merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kemajuan suatu daerah. Selain itu, terjadinya pembangunan ekonomi daerah atau regional dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat ukuran partisipasi masyarakat pada suatu daerah tersebut. Dalam upaya pembangunan ekonomi daerah atau lokal memiliki orientasi pada peningkatan jumlah serta jenis-jenis peluang pekerjaan untuk masyarakat daerah memerlukan pola kemitraan yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dari partisipasi masyarakat serta penggunaan sumberdaya-sumberdaya sehingga menjadi potensi yang diperlukan perancangan dan pembangunan perekonomian daerah (Pasaribu, 2015).

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan sebuah kebijaksanaan yang diambil, dilakukan, atau dibuat oleh seorang atau suatu kelompok yang dipergunakan untuk mewujudkan sebuah tujuan tertentu untuk kepentingan masyarakat (Taufiqurokhman, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan publik dapat dijabarkan menjadi sebuah konsep atau rancangan yang dapat dijadikan garis besar serta dasar rancangan pada saat melakukan proses pelaksanaan sebuah kegiatan, aturan, serta cara menindak lanjut sebuah konsep baik untuk pemerintah atau organisasi sebagai salah satu cara dalam upaya mencapai sebuah tujuan atau sasaran. Suatu kebijakan diperlukan baik untuk digunakan secara nasional maupun secara regional. Hal itu dikarenakan suatu kebijakan akan digunakan sebagai hukum atau landasan untuk segala sesuatu menyangkut kepentingan orang banyak. Perlu pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pemerintah sebagai aktor publik atau stakeholder yang penting terutama dalam hal kebijakan publik karena sebuah kebijakan publik pasti berakitan erat dengan masyarakat luas.

Otonomi Daerah

Dalam Bahasa Yunani, otonomi terdiri dari dua kata yaitu pertama, autos yang bermakna sendiri dan kata kedua, nomos yang bermakna pemerintah. Otonomi memiliki arti memerintah sendiri, dalam lingkup administrasi publik daerah seringkali disebut sebagai local self government. Pemerintah pusat memberi pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah yang disebut sebagai Otonomi Daerah atau daerah otonom guna melakukan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah memiliki tujuan agar sebisa mungkin suatu daerah dapat mengurus serta mengatur segala sesuatu yang ada di daerah tersebut baik itu untuk keperluan pembangunan daerah, pelayanan terhadap masyarakat ataupun yang lain.

Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu ketidakmampuan seseorang atau suatu kelompok dalam memenuhi segala kebutuhannya. Dalam arti sempit, kemiskinan merupakan suatu keadaan seseorang atau kelompok mengalami kekurangan terhadap uang yang digunakan untuk menopang dan memenuhi kebutuhan. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu hal yang dialami oleh seseorang atau kelompok dalam ketidakberdayaan, kerentanan dalam menghadapi situasi darurat, ketergantungan, keterasingan. Menurut Widodo (1997) dalam Sartika (2016) menerangkan bahwa kebutuhan dasar akan selalu terkait dengan kemiskinan, dikarenakan masalah kemiskinan adalah persoalan yang mendasar.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan baik itu dalam proses mengatasi seluruh masalah atau sesuatu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipasi memiliki makna ikut dalam sebuah bagian, ikut serta, atau keikutsertaan. Menurut Isbandi (2007) dalam Deviyanti (2013) partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu identifikasi, pemilihan, pengambilan keputusan dalam mengatasi sebuah masalah atau potensi serta terlibat dalam pelaksanaan, dan evaluasi masalah atau potensi.

Stakeholder

Stakeholder merupakan suatu atau beberapa pihak yang membuat, terlibat, mengelola, serta mendampingi suatu permasalahan atau program. *Stakeholder* memiliki peranan yang cukup penting dalam suatu permasalahan atau program. *Stakeholder* dalam hal ini dapat berupa individu, kelompok, atau instansi pemerintahan ataupun swasta. Menurut (Gonsalves et al. dalam Iqbal, 2007 dalam M. Ali Zuhri dkk., 2015) menerangkan bahwa *stakeholder* merupakan seseorang individu, kelompok, atau komunitas yang memiliki dampak atau yang mendapat dampak dari suatu kebijakan, program, atau suatu pembangunan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan penelitian survei. Penggunaan metode ini sesuai dengan tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi program “Bela-Beli Kulon Progo” terhadap masyarakat di daerah Kulon Progo. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan pembagian kuisioner. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan merupakan *non probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*. Untuk alat analisis yang digunakan yaitu metode Miles and Huberman dengan menggunakan empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan implementasi Program “Bela-Beli Kulon Progo” terhadap Masyarakat di daerah Kulon Progo dalam penelitian ini menggunakan dua perspektif yaitu perspektif dari masyarakat yang tergabung dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo” dan Perspektif dari stakeholder dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo”. Dalam perspektif pertama, masyarakat yang dimaksud merupakan masyarakat yang tergabung dalam program yang ada dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo” yaitu perwakilan Gabungan Kelompok Tani Makmur Sejahtera dan lima pekerja Batik Geblek Renteng di Sentra Batik Sembung. Perspektif kedua, stakeholder yang ada dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo” meliputi perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kulon Progo, perwakilan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, perwakilan Perusahaan Umum Daerah Tirta Binangun.

Dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo” terdapat berbagai macam program yang dilakukan agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan serta dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Program-program tersebut antara lain Beras Daerah atau PanganKu, Pengembangan UMKM dan hadirnya Tomira, Air-Ku dan Batik Geblek Renteng. Beberapa program tersebut merupakan cara atau langkah yang dilakukan dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo” yang tujuannya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

Dari hasil wawancara terkait dengan implementasi program “Bela-Beli Kulon Progo” dapat diperoleh data dan informasi bahwa dengan adanya program tersebut masyarakat merasakan dampak perekonomian, partisipasi masyarakat, serta peran dari

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan program tersebut. Ketiga hal tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui empat program yaitu Beras Daerah atau PanganKu, Pengembangan UMKM dan Hadirnya Tomira, AirKu dan Batik Geblek Renteng.

Dari keempat program tersebut masing-masing narasumber menyatakan bahwa secara perekonomian, partisipasi masyarakat, dan peran pemerintah sangatlah dirasakan oleh masyarakat yang tergabung dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo”. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal terkait dengan beberapa peningkatan dalam hal perekonomian, antusiasme dan tingkat keikutsertaan persisipasi masyarakat, serta peran dari pemerintah dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo”

Dalam hal perekonomian, masyarakat yang tergabung dalam program tersebut mengalami beberapa peningkatan yaitu pendapatan, kualitas, serta produktivitas. Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari narasumber berdasarkan hasil wawancara secara langsung dan pembagian kuisisioner.

Dalam hal partisipasi masyarakat, masyarakat memiliki tingkat antusiasme dan tingkat keikutsertaan masyarakat dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo” yang cukup tinggi. Dari keterangan narasumber melalui wawancara langsung dan pembagian kuisisioner dapat diperoleh informasi yang menyatakan kedua hal tersebut. Setiap tahun mengalami peningkatan dalam hal antusiasme dan keikutsertaan.

Dalam hal peran dari pemerintah daerah melalui dinas terkait, masyarakat merasakan adanya peran yang cukup baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait. Peran yang dirasakan oleh masyarakat yaitu setiap periode dinas terkait memberikan penyuluhan, pendampingan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program “Bela-Beli Kulon Progo” yang diikuti oleh masyarakat tersebut. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh beberapa narasumber melalui wawancara secara langsung dan pembagian kuisisioner.

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan implentasi program “Bela-Beli Kulon Progo” dapat diperoleh data dan informasi bahwa dengan adanya program tersebut masyarakat merasakan dalam hal perekonomian, partisipasi masyarakat, serta peran dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan program tersebut. Ketiga hal tersebut berdasarakan keterangan dari beberapa *stakeholder* yang menyatakan program tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui empat program yaitu Beras Daerah atau PanganKu, Pengembangan UMKM dan Hadirnya Tomira, AirKu dan Batik Geblek Renteng.

Dari keempat program tersebut masing-masing narasumber yang berasal dari stakeholder terkait dalam hal ini dinas-dinas terkait yang menyatakan bahwa secara perekonomian, partisipasi masyarakat, dan peran pemerintah sangatlah dirasakan oleh masyarakat yang tergabung dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo”. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa hal terkait dengan beberapa peningkatan dalam hal perekonomian, antusiasme dan tingkat keikutsertaan persisipasi masyarakat, serta peran dari pemerintah dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo”.

Dalam hal perekonomian, Program “Bela-Beli Kulon Progo” berdasarkan keterangan dari beberapa dinas terkait program tersebut sangat membantu perekonomian masyarakat yang mengikuti Program “Bela-Beli Kulon Progo” serta perekonomian Kabupaten Kulon Progo itu sendiri melalui kontribusi pada setoran PAD. Dinas-dinas terkait menyatakan masyarakat merasakan peningkatan perekonomian secara langsung dikarenakan adanya penyerapan tenaga kerja serta adanya peningkatan produktivitasnya. Selain itu, dinas terkait juga memberikan keterangan bahwa program tersebut juga berkontribusi pada perekonomian kabupaten Kulon Progo melalui sumbangan PAD. Hal ini dikarenakan penggunaan potensi local yang dimiliki Kabupaten Kulon Progo itu sendiri sehingga dapat berkontribusi pada PAD Kabupaten Kulon Progo.

Dalam hal partisipasi masyarakat, berdasarkan keterangan dari dinas terkait partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam kontribusinya dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo”. Tingginya partisipasi masyarakat tersebut berdasarkan keikutsertaan dan antusiasme dalam mengikuti serta berpartisipasi dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo”. Namun dinas terkait juga memberikan keterangan awal mula partisipasi masyarakat masih kurang dikarenakan masyarakat memerlukan contoh terlebih dahulu dan memerlukan pembuktian nyata pada program tersebut.

Dalam hal peran pemerintah daerah melalui dinas terkait, beberapa dinas memberikan keterangan bahwa setiap periode atau tahun selalu melakukan pendampingan, penyuluhan, pelatihan, dan pengawasan. Selain itu, dinas terkait juga melakukan beberapa inovasi terhadap program-program yang ada dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo”.

Kesimpulan

Dari informasi hasil wawancara dan kuesioner serta pembahasannya yang terkait dengan implementasi program “Bela-Beli Kulon Progo” terhadap masyarakat di daerah Kulon Progo yang menggunakan dua perspektif yaitu perspektif dari masyarakat yang

tergabung dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo” dan perspektif dari stakeholder dalam Program “Bela-Beli Kulon Progo” dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Pada perekonomian diperoleh kesimpulan berdasarkan wawancara dan pembagian kuesioner yaitu adanya program tersebut mampu menyerap tenaga kerja lokal, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas, ataupun meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, program tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung mampu berkontribusi pada perekonomian masyarakat ataupun Kabupaten Kulon Progo.

Pada partisipasi masyarakat diperoleh kesimpulan berdasarkan wawancara dan pembagian kuesioner yaitu program tersebut memiliki kontribusi pada partisipasi masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Tingkat partisipasi masyarakat dapat terlihat dari antusiasme warga masyarakat dalam mendukung program tersebut, keikutsertaan warga masyarakat dalam program tersebut, dan masyarakat menjadi berdaya saing yang baik setelah adanya program tersebut walaupun pada awal dimulainya program tersebut kurang antusias.

Pada peran Pemerintah Daerah melalui dinas terkait diperoleh kesimpulan berdasarkan wawancara dan pembagian kuesioner bahwa Pemerintah Daerah melalui dinas terkait sangat baik dan efisien. Peranan tersebut yaitu setiap tahun memberikan penyuluhan, pendampingan, pengawasan, dan selalu berinovasi dalam menjalankan Program Bela-Beli Kulon Progo tersebut.

Daftar Pustaka

- Arberd, F., & Kristianto, N. (2015). Partisipasi Masyarakat Kecamatan Kalibawang dalam Gerakan “Bela-Beli Kulon Progo,” 12(1), 19–28.
<https://doi.org/10.21831/socia.v12i1.5314>
- Dedi, T. (2016). Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Mewujudkan Program “Bela Beli Kulon Progo.”
- Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Kecamatan Balikpapan Tengah, 1(2), 380–394.
- Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, I. H. (2004). Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian (Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang) Etika Ari Susanti, Imam Hanafi, Romula Adiono, 1(4), 31–40.
- Habeahan, S. H. (n.d.). Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Program Bela Beli Kulon Progo.

- Handoko, B. S. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Program Bela Beli Kulon Progo Tahun 2017-2018, 3(1), 46–57. <https://doi.org/10.24905/igj.v3i1.1482>
- Kehik, S. (2018). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan (Studi Kasus di Desa Oenenu Utara Kabupaten Timor Tengah Utara), 3(2502), 19–22. <https://doi.org/10.32938/ag.v3i2.317>
- Kristiono, N. (2015). Buku Ajar Otonomi Daerah.
- Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2014). Peran Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Muhammad Ali Zuhri Mahfud , Bambang Santoso Haryono , Niken Lastiti Veri Anggraeni. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 3(12), 2070–2076.
- Ma'ruf, A., & Wihastuti, L. (2008). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 9(1), 44–55. <https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1526>
- Musfiroh, W. I. (2019). “Bela Beli Kulonprogo” dan Implikasinya Bagi Karyawan di Industri Batik Sinar Abadi Desa Ngentakrejo, 1–8. <https://doi.org/10.14421/jpm.2019.031-06>
- Pasaribu, R. (2015). Pembangunan daerah.
- Sartika, C., Balaka, M. Y., & Rumbia, W. A. (2016). Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna, 1(April), 106–118.
- Suhada, B. (2017). Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Lampung Timur, 11(1).
- Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik, (1993).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (2004).
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009. (2009)